

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2019

ABSTRAK

Enggla Novia Gusyani, No. BP 1210843010, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing oleh Kusdarini, S.IP, M.PA dan Dr. Roni Ekha Putera, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 163 halaman dengan referensi 16 buku teori, 11 buku metode, 2 skripsi, 2 jurnal, 1 Peraturan Daerah, 2 Peraturan Gubernur, 1 Perundang-undangan, 2 laporan, dan 5 website internet.

Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan dengan tujuan agar sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna serta dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut Pemerintah Sumatera Barat berharap mampu mengatasi masalah seperti penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah atau dilarang melalui perizinan usaha perikanan dan agar terciptanya keteraturan dan tertib dalam pemanfaatan sumberdaya ikan sekaligus melindungi keberlangsungan sumberdaya perikanan baik itu lingkungannya maupun perikanan itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melihat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan dengan menghadapi beberapa kendala yakni kurangnya jumlah SDM dalam mengimplementasi perda ini, kemudian sarana dan prasarana belum mencukupi yakni kurangnya jumlah unit kapal, yang ada untuk melakukan pengawasan perairan dan perikanan dalam pelaksanaan perda ini. komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan mitra kerja yakni TNI AL dan Polisi Perairan sudah sangat baik dalam melaksanakan pengawasan penangkapan ikan. Selanjutnya, untuk kondisi sosial ekonomi maupun politik masyarakat terhadap perda ini yakni asyarakat medukung adanya perda ini namun tetap ditemui pelanggaran yakni adanya kapal yang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen surat izin penangkapan ikan dan dengan alat tangkap yang dilarang dan masyarakat tidak mau mengganti alat tangkap tersebut dengan dalih alat tangkap tersebut telah membudaya di masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengawasan Penangkapan Ikan

ABSTRACT

Enggla Novia Gusyani, Registered Student Number 1210842011, Implementation of Regional Regulations West Sumatra Province Number 4 of 2012 concerning Management and Protection Fish Resources, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2019. Supervised by Kusdarini, S. IP, M.PA and Dr. Roni Ekha Putera, M.PA. This thesis consists of 163 pages with references to 16 theoretical books, 11 method books, 2 theses, 2 journals, 1 Regional Regulation, 2 Governor Regulations, 1 Legislation, 2 reports, and 5 internet websites.

The West Sumatra government issued a policy in the form of a Regional Regulation West Sumatra Province Number 4 of 2012 concerning Management and Protection Fish Resources with the aim that the fish resources and environment remain sustainable and effective and can be used optimally and sustainably to improve public welfare. Through this policy the West Sumatra Government hopes able to overcome problems such as illegal fishing, use of fishing gear which is not friendly or prohibited through fisheries business licensing and so that it is created orderliness and orderly use of fish resources while protecting the sustainability of fisheries resources, both the environment and the fisheries themselves. Based on this phenomenon, researchers are interested in seeing the implementation of Regional Regulations West Sumatra Province Number 4 of 2012 concerning Management and Protection Fish Resources.

In this study, researchers used a qualitative research method with design descriptive. The theory that the researchers used was the theory of implementation of the Van Meter & Van policy Horn. The data that researchers use is primary data and secondary data collected with the method of interview, observation and documentation.

The results of the study indicate that the Implementation of Provincial Regulations West Sumatra Number 4 of 2012 concerning Management and Protection of Resources Fish by the West Sumatra Province Marine and Fisheries Service has been carried out with faced with several obstacles, namely the lack of human resources in implementing local regulations this, then the facilities and infrastructure are insufficient, namely the lack of the number of ships, existing to conduct waters and fisheries supervision in the implementation of this regulation. communication and coordination between the Office of Marine and Fisheries of the Province of West Sumatra and partners Indonesian National Army Navy and Water Police have been very good at carrying out fishing surveillance. Furthermore, for the socio- economic and political conditions of the community towards this regulation is that the community supports the existence of this regulation but violations are still found the existence of ships that do fishing without a permit document fish catching. Then many people still use fishing gear not environmentally friendly and do not want to replace it under the pretext that the fishing gear has been entrenched in society.

Keywords: Policy Implementation, Suveillance of Fishing